

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditomo, Anindito. *Merdeka Belajar: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, 2023.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aprita, Serlina. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mita Wacana Media, 2020.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. SIGn, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan II. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: CV. Sanabil, 2022.
- Gunawan, Ahmad. *Hukum Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Huda, Nurul. *Kebijakan Pendidikan dan Keadilan Sosial*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Indrati, Maria Farida. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1945.
- Korowicz, Marek St. *The Problem of the International Personality of Individuals*. England: Ashgate, 2010.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Cetakan ke-3. Bandung: CV. Mandar Maju, 1989. Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Maulana, Ahmad. *Dampak Kebijakan Zonasi Pendidikan terhadap Kesetaraan Akses*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Prasetyo, Bambang. *Kebijakan Afirmasi dalam Pendidikan: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Penataan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2017.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised ed. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Sasmito, Joko. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, 2018.

Setiawan, Ehta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2018.

Shihab, Najelaa. "Melihat Kembali Efektivitas Sistem Zonasi Pendidikan." Dalam *Pendidikan yang Memerdekakan*, diedit oleh F. Baihaqi. Jakarta: Penerbit Mizan, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

Sofian, Ahmad. *Judicial Review dalam Sistem Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Soemantri Martosoewignjo, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.

Sumadi, Ahmad Fadli. *Hukum Perundang-Undangan: Teori dan Prktik*. Malang: Setara Press, 2016.

Sumaryono, E. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: InMedia, 2019.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal

Abidin, Muhammad Zainal dan Ansori. "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya." *Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 20.

Akbar, R. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Pelayanan Publik Di Desa Melalui Standar Pelayanan." *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, no. 1 (2019): 37.

- Astomo, Putera. "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): 173.
- Auria, Putri, Rizki Ananda Putra, dan Misleni. "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum." *Juris Humanity* 3, no. 1 (2024): 1.
- Brantingham, P. J. "The Behavior of Law: A Review of the Theory." *Law & Society Review* 13, no. 1 (1978): 945.
- Emmanuel, Sujatmoko. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (Februari 2010).
- Fadilah, Laily Nur, Nihayatul Istikomah, dan Afriantoni. "Kontribusi Ilmu Pengetahuan Islam dalam Pembentukan Karakter untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 496.
- Farinacci-Fernós, Jorge M. "Constitutionally Required Judicial Activism: Re-Examining the Role of Courts in Modern Constitutional Adjudication." *Hastings International and Comparative Law Review* 41, no. 1 (2018): 59.
- Faturohman, Fathurrahman, Sofi Anwar, dan Yulliastuti Yulliastuti. "Analisis Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 299.
- Fendri, Azmi. "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2013).
- Harefa, Oinike Natalia. "Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr." *Jurnal Sundermann* 13, no. 1 (2020): 40.
- Ibrizzahra, R. Q., D. M. Salam, T. P. Isaeni, dan P. S. Herlina. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan." *Aliansi* 1, no. 4 (2024): 272.
- Kemendikbud. "Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan." *Kemendikbud RI* 4, no. 5 (2018): 1-28.

- Laksmi, Dinda Ayu Vitaria dan Hesti Dwi Astuti. "Penerapan Pendekatan Hukum dalam Inovasi Pembelajaran terhadap Implementasi Kurikulum Hukum di Perguruan Tinggi." *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2024): 53.
- Legawi, Nita Pandini. "Kebijakan Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Balikpapan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020).
- Mehrabi, N., F. Morstatter, N. A. Saxena, K. Lerman, dan A. Galstyan. "A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning." *ACM Computing Surveys* 54, no. 6 (2021): 1.
- Noviyantho, R. "The Role of Law in Addressing Racial Disparities in the Criminal Justice System: A Social Science Perspective." *Journal of Public Representative and Society Provision* 1, no. 2 (2023): 38.
- Nurlailiyah, Aris. "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta." *Jurnal PPM lain Kediri* 17, no. 1 (2019).
- Orzeszyna, K. "Universalism of Human Rights: Notion of Global Consensus or Regional Idea." *Review of European and Comparative Law* 46, no. 3 (2021): 165.
- Palguna, Bima Kumara Dwi Atmaja. "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023).
- Pontier, R. "The Behavior of Law: A Review of the Literature." *Journal of Criminal Law and Criminology* 70, no. 4 (1979): 545.
- Purwanti, D., I. Irawati, J. Adiwisasta, dan H. Bkti. "Implementation of New Student Admission Policy Based on Zoning System in Bandung City." *Jurnal Governansi* 5, no. 1 (2019): 12-23.
- Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad. "Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021).
- Rasya, H. S., dan I. Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.

Rasyd, Aulia. "Hak Memilih Pendidikan dalam Kerangka Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (Juni 2018): 312.

Setiawan, Wawan dan Dwi Utami Kusnadi. "Zonasi Pendidikan Membangun Inspirasi Tanpa Diskriminasi." *Direktorat PSMA* (2019).

Sukardi, Ellora. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 17.

Syafitri, Eni dan Agus Mahfud Fauzi. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Di SMAN 1 Kamal." *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 18, no. 01 (2021).

Syahputri, F. B. "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 9, no. 2 (2022): 177.

Tim Hukum Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). "Catatan Kritis atas Permendikbud No 1 Tahun 2021." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan* 8, no. 2 (2021): 112-115.

Ula, Dany Miftahul dan Irvan Lestari. "Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5, no. 1 (2020): 10.

Umiati, Titik, Sumardi, Budi Alqadri, Muh. Zubair, dan Anik Purwantiningsih. "Dampak Sistem Zonasi terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 5 Pringgabaya)." *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 4 (2024): 860.

Vidyapramatya, Nurindria Naharista. "Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum menurut Teori Diskriminasi." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, no. 2 (2020): 145.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Sumber Internet

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Kebijakan Domisili adalah Kebijakan yang Utuh dan Terintegrasi." <https://www.kemdikdasmen.go.id/main/blog/2025/07/kebijakan-domisili-adalah-kebijakan-yang-utuh-dan-terintegrasi>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Domisili." <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-domisili>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

"3 Fungsi Hukum Administrasi Negara." <https://www.eduspensa.id/3-fungsi-hukum-administrasi-negara/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

Kompas.com. "Kuota PPDB Zonasi Diperbesar, Daya Tampung Sekolah Jadi Tantangan." 20 Mei 2023.

Shihab, Najelaa. "Melihat Kembali Efektivitas Sistem Zonasi Pendidikan." Tirta.id, 28 Juni 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Laporan Evaluasi Implementasi PPDB Zonasi 2023*. Jakarta: Kemdikbudristek, 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Pengawasan PPDB Tahun 2021*. Jakarta: KPAI, 2022.

WAWANCARA

Suprpto, Ari (Kepala Seksi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Jawa Timur). Wawancara, 15 Februari 2025.